

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



LKjIP 2022



Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pelayanan Pajak Daerah Tahun 2022 merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja kegiatan masing-masing program yang dilaksanakan oleh satuan Kerja Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dilaksanakan dengan mempedomani Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja (PK), Pelaporan Kinerja dan tata cara riviui tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyajian data dan informasi seluruh aktifitas, sasaran kerja dan capaian kegiatan yang tersaji dalam LKjIP ini adalah merupakan gambaran akuntabilitas kinerja Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo pada tahun anggaran 2022.

Sidoarjo, 27 Februari 2023

**KEPALA BADAN PELAYANAN
PAJAK DAERAH**



Ditandatangani secara elektronik oleh

ARI SURYONO., S.Sos, M.Si
NIP. 197502131993111001

ARI SURYONO., S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP 19750213 199311 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH**

Jl. Pahlawan No. 56 Sidoarjo Kode Pos 61212
Telepon. (031) 8952630 Fax :(031)8921914
Email : pajakdaerah@sidoarjokab.go.id Website :

PERNYATAAN TELAH DI REVIU**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH TAHUN 2022**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab dari Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Sidoarjo, 27 Februari 2023

**KEPALA BADAN PELAYANAN
PAJAK DAERAH**

Ditandatangani secara elektronik oleh

ARI SURYONO., S.Sos, M.Si
NIP. 197502131993111001

ARI SURYONO., S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19750213 199311 1 001

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang penyusunannya didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Tahun 2022 ini menyajikan hasil pengukuran kinerja pencapaian dua sasaran yakni 1). Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dengan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah yang Prima; 2). Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah. Kedua sasaran tersebut telah mencapai nilai rata-rata diatas 100% dengan predikat sangat baik. Selanjutnya, dalam mencapai sasaran tersebut, Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan 2 Program dan 8 Kegiatan yang didukung dengan anggaran sebesar Rp. 47.987.203.378. Namun, dalam pencapaiannya juga tidak terlepas dari beberapa kendala, yakni:

- Data WP/OP masih ada yang belum valid yang berpengaruh terhadap ketetapan pajak tidak sesuai kondisi sebenarnya
- Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban dalam pembayaran pajak daerah;
- NJOP yang belum sama dengan nilai pasar menyebabkan sulitnya menentukan NPOP secara wajar atas transaksi jual beli yang terjadi;
- Terdapat piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) atas objek Tanah Kas Desa (TKD) dan eks TKD yang telah dilakukan inventarisir *by system* dengan potensi piutang sebesar Rp20.000.000.000,00;
- Tidak adanya kegiatan pemutakhiran massal Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sehingga basis data PBB-P2 tidak dapat dimutakhirkan.

Sehingga, beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah adalah:

- Pengembangan pelayanan pembayaran dan pelaporan pajak elektronik
- Menyelenggarakan kegiatan penghapusan sanksi administratif pajak daerah
- Koordinasi untuk penghapusan dengan penghapusan secara bertahap
- Mengusulkan SDM untuk mengikuti kediklatan perpajakan
- Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat/Wajib Pajak melalui media cetak maupun elektronik
- penguatan regulasi pajak daerah;
- Melakukan pembaruan nilai pasar tanah dan bangunan secara rutin;

- melaksanakan penagihan aktif atas tunggakan dengan menyampaikan himbauan, surat tagihan, dan bekerja sama dengan pihak lain.

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan.....	6
1. Kedudukan	6
2. Aspek Strategis Organisasi.....	7
Bab II Perencanaan Kinerja.....	9
A. Visi dan Misi.....	9
B. Tujuan dan Sasaran.....	9
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	9
D. Perencanaan Anggaran Tahun 2022.....	10
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	13
A. Pengukuran Kinerja.....	13
B. Analisis Capaian Kinerja.....	14
C. Realisasi Anggaran.....	25
Bab IV Penutup.....	27
A. Aspek Strategis Organisasi.....	27
B. Tindak Lanjut	27

BAB I

Pendahuluan

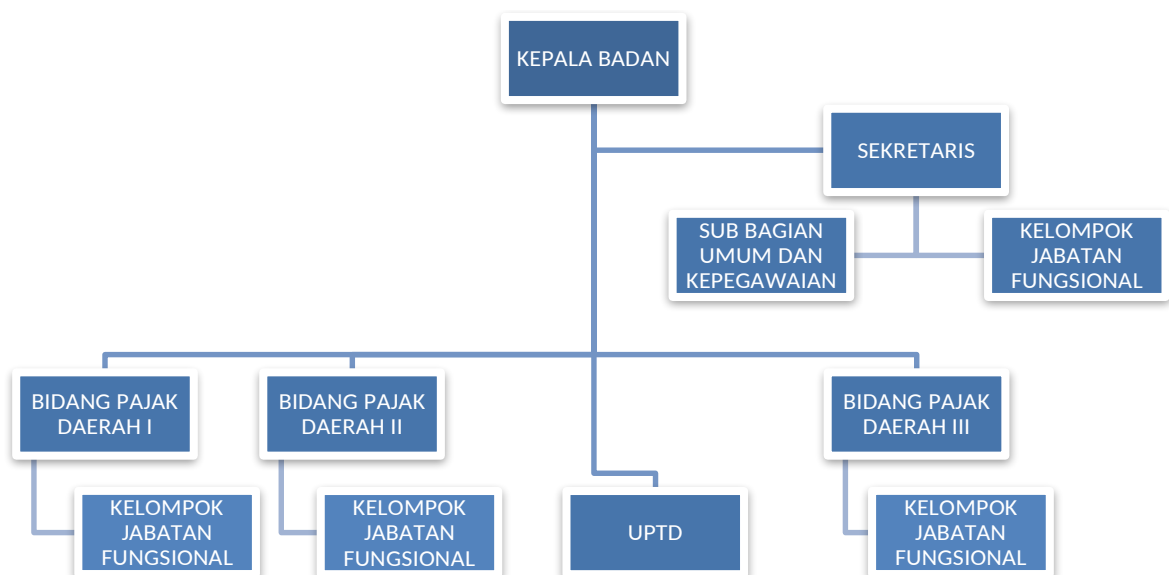
1 Kedudukan

Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut maka Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang keuangan pada sub bidang pajak daerah.

Melalui peraturan daerah diatas maka Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. Dalam ketentuan tersebut menyebutkan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan pada sub bidang pelayanan pajak daerah. Dalam melaksanakan tugas, Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. pelaksanaan administrasi badan;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo maka disusun struktur organisasi. Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo dipimpin oleh Kepala Badan, yang dibantu oleh Sekretariat dan bidang teknis. Adapun susunan organisasi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:



Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo memiliki ASN sebanyak 93 orang. ASN tersebut terbagi kedalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan

jabatan fungsional. Berikut data ASN pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2022:

Tabel 1.1
Data ASN Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo

NO	Jenis Jabatan	Jumlah
1	Kepala Badan	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Bidang	3
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1
5	Jabatan Fungsional Ahli Muda	10
6	Jabatan Fungsional Pranata Komputer Mahir	1
7	Pelaksana	76
<i>Jumlah</i>		93

2 Aspek Strategis Organisasi

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan tersebut harus dapat diidentifikasi oleh perangkat daerah untuk disusun rekomendasi penanganannya. Rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Berikut pemetaan permasalahan pokok, masalah dan akar masalah pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 1.2
Pemetaan permasalahan pokok, masalah dan akar masalah

No	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Potensi pajak daerah yang belum optimal tergali	<ol style="list-style-type: none"> Masih adanya OP dan WP yang belum taat akan regulasi dalam pembayaran pajak daerah Mekanisme menghitung pajak sendiri (MPS) memungkinkan adanya wajib pajak yang kurang terbuka, taat dan jujur dalam pelaporan omset usaha 	<ol style="list-style-type: none"> Masih adanya WP dan OP yang tidak tepat waktu dalam pembayaran pajak Ketidakpastian kondisi ekonomi yang dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 mengakibatkan berpengaruh terhadap keberlangsungan pembayaran wajib pajak
2	Masih tingginya piutang pajak Kabupaten	Piutang pajak yang tidak dapat ditagih karena	<ol style="list-style-type: none"> Belum adanya perubahan regulasi

	Sidoarjo	tidak ditemukan wajib pajaknya, perubahan objek pajak fasum, fasos	penghapusan piutang pajak 2. Belum adanya pengkategorian permasalahan piutang pajak beserta tindak lanjutnya
--	----------	--	---

Dari pemetaan permasalahan-permasalahan dikemukakan tersebut di atas Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo telah merumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran WP untuk melakukan pembaruan data, sehingga membayar pajak tidak sesuai dengan kondisi riil wajib pajak;
2. Masih ditemukan WP yang kurang patuh dalam membayar pajak
3. Piutang pajak yang tidak dapat ditagih karena tidak ditemukan wajib pajaknya

BAB II

Perencanaan Kinerja

A *Visi dan Misi*

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki visi “Mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang sejahtera, maju, berkarakter dan berkelanjutan”. Visi tersebut tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026. Dalam dokumen perencanaan 5 tahunan tersebut termuat misi yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi dari Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah menunjang misi **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha.**

B *Tujuan dan Sasaran*

Dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis serta memperhatikan misi Kabupaten Sidoarjo maka dirumuskan tujuan dan sasaran dari Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi. Dengan adanya tujuan yang akan kami dukung adalah **Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah** dengan memberikan arah yang lebih jelas untuk mencapai sasaran Meningkatkan Penerimaan Pajak daerah Dengan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah yang Prima dan Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah yang dituju. Sehingga Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo menetapkan tujuan dan sasaran, yaitu:

1. Tujuan: Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah
 - a. Sasaran: Meningkatkan Penerimaan Pajak daerah dengan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah yang Prima
 - a. Sasaran: Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah

C *Perjanjian Kinerja Tahun 2022*

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 maka ditetapkan sasaran yang perlu dicapai dan direalisasikan pada setiap tahunnya dengan penguatan pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pelayanan Pajak Daerah. Berikut Perjanjian Kinerja tahun 2022 yang memuat sasaran beserta indikator dan target kinerja.

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja yang memuat Sasaran 1 dengan indikator kinerja utama

No	Sasaran 1	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya	Persentase Peningkatan	4,85%

Penerimaan Pajak daerah Dengan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah yang Prima	Penerimaan PBB-P2	
	Persentase Peningkatan Penerimaan BPHTB	14,86%
	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak daerah Lain	11,05%
	Penerimaan pajak daerah	Rp1.068.000.000.000

Pada Indikator kinerja Utama sebagai mana tertuang dalam Renstra, pada indikator Persentase Peningkatan Penerimaan PBB-P2 dengan target 4,85% didasarkan pada penurunan target pendapatan atas PBB-P2 dari Rp273.000.000.000 menjadi Rp267.000.000.000 dengan pertimbangan bahwa penerimaan pada bulan September yang merupakan jatuh tempo pembayaran PBB-P2 sebesar Rp252.332.670.752 sedangkan penerimaan PBB-P2 pada periode bulan selanjutnya tidak sebesar pada periode bulan Januari-September. Begitu pula pada Pajak Daerah Lainnya yang terdiri atas 7 jenis sub pajak yakni Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah. Pajak Penerangan Jalan (PPJ) harus mengalami penurunan target sebesar Rp24.300.000.000 disebabkan persentase penerimaan hingga bulan September masih sebesar 69,61%. Lain halnya dengan BPHTB yang mengalami peningkatan target PK menjadi 14,86%, karena target penerimaan BPHTB telah terlampaui sebesar 101,47%, hal ini berakibat perubahan target penerimaan BPHTB naik menjadi Rp332.000.000.000.

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja yang memuat Sasaran 2 dengan indikator kinerja tambahan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	A
		Nilai RB	36,3
		Nilai IPP	A
		Nilai SKM	Sangat Baik

Pada indikator kinerja tambahan merupakan penguatan pencapaian pada program strategis daerah, serta tugas tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati Kepada Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah untuk dilaksanakan dan dicapai dan dilaporkan pada akhir tahun yang dikoordinasikan oleh Bappeda, BPKAD, Bagian Pembangunan, Bagian Organisasi guna disampaikan dalam laporan kinerja akhir tahun.

D Perencanaan Anggaran Tahun 2022

Untuk mewujudkan sasaran dan mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, maka disediakan anggaran sebesar Rp42.593.452.631. Namun untuk menyesuaikan dinamika dan situasi kondisi pencapaian target kinerja, ditunjukkan dalam cascading tabel 2.3, maka anggaran yang telah tersedia dilakukan perubahan sebesar Rp47.987.203.378 dengan rincian sebagaimana tabel 2.2.

Tabel 2.3

Cascading BPPD Tahun 2022

Tujuan PD	Indikator Tujuan	Target	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Target	Program	Indikator Kinerja Program	Target		
Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan Pajak Daerah	10,28%	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dengan kualitas pelayanan prima	1. Persentase peningkatan Penerimaan PBB-P2	4,85%	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase capaian penerimaan PBB-P2 terhadap target	100%		
				2. Persentase peningkatan Penerimaan BPHTB	14,86%		Prosentase capaian penerimaan BPHTB terhadap target	100%		
				3. Persentase peningkatan Penerimaan Pajak Daerah lain	11,05%		Prosentase capaian penerimaan PDL (pajak restoran, hotel, hiburan, parkir, reklame, Penerangan Jalan dan Air Tanah) terhadap target	100%		
						4. Penerimaan pajak daerah	Rp1.068.000.000.000			
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	4. Nilai SAKIP	A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kepuasan aparatur SKPD terhadap pelayanan kesekretariatan	90		
				5. Nilai RB	36,3					
				6. Nilai SKM	A					
7. Nilai IPP	Sangat Baik									

Tabel 2.4
Rincian anggaran pada tahun 2022

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Anggaran Perubahan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Rp525.000.000	Rp525.000.000
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp27.860.947.315	Rp31.639.264.333
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp61.066.600	Rp61.066.600
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp2.449.133.736	Rp3.211.992.365
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp369.579.800	Rp599.329.800
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Rp3.399.134.000	Rp3.364.141.500

		Pemerintahan Daerah		
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp700.000.000	Rp932.000.000
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Rp7.228.591.180	Rp 7.654.408.780
Total Anggaran			Rp. 42.593.452.631	Rp. 47.987.203.378

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja. Pengukuran indikator kinerja sasaran dilaksanakan dalam rangka menjamin adanya peningkatan akuntabilitas kinerja dengan melakukan klarifikasi *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja yang direncanakan dan diperjanjikan dengan realisasi kinerja yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Terhadap terjadinya celah kinerja, dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

A Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dan rencana/target yang ditetapkan. Selanjutnya dikelompokkan dalam nilai dan predikat kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1

Pengelompokan nilai dan predikat kinerja

No.	Nilai	Predikat Kinerja
1	$> 90,01$	Sangat Baik
2	$80,01 \leq 90$	Baik
3	$70,01 \leq 80$	Cukup
4	$0 \leq 70,01$	Kurang

Hasil pengukuran kinerja pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo atas Perjanjian Kinerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran

No.	Tujuan	Sasaran	Rata-rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja
1.	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Meningkatnya Penerimaan Pajak daerah Dengan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah yang Prima	175,23%	Sangat Baik
2.		Meningkatnya	103,8%	Sangat Baik

		Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah		
--	--	--	--	--

B Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas maka perlu dilakukan analisis untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Selain itu analisis capaian kinerja digunakan untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan sebagai masukan dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2022. Berikut analisis capaian kinerja pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022:

1. Sasaran pertama Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dengan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah yang Prima

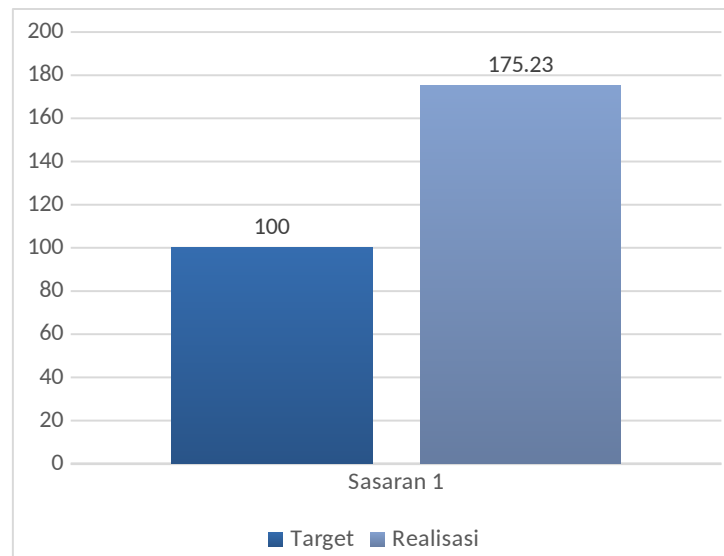
Dalam sasaran pertama untuk tahun 2022 nilai capaian kerjanya sebesar 175,23%. Berikut tabel perbandingan capaian kinerja sasaran pertama.

Tabel 3.3
Realisasi kinerja sasaran pertama Meningkatnya Penerimaan Pajak daerah Dengan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah yang Prima Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1	Meningkatnya Penerimaan Pajak daerah Dengan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah yang Prima	Persentase Peningkatan Penerimaan PBB-P2	4,85%	13,56%	279,51%
		Persentase Peningkatan Penerimaan BPHTB	14,86%	25,57%	172,05%
		Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak daerah Lain	11,05%	14,98%	135,55%
		Penerimaan pajak daerah	Rp1.068.000.000.000	Rp1.215.303.165.454,49	113,79%

Grafik 3.2.1

Realisasi kinerja sasaran pertama meningkatnya Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dengan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah yang Prima Tahun 2022



Dalam pencapaian sasaran pertama diukur tingkat keberhasilannya dengan jumlah indikator sebanyak empat indikator. Indikator pertama persentase Peningkatan Penerimaan PBB-P2 adalah Perbandingan peningkatan Realisasi penerimaan PBB-P2 tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi penerimaan PBB-P2 tahun 2021. Berdasarkan tabel 3.2 diatas, indikator pertama persentase Peningkatan Penerimaan PBB-P2 dapat direalisasi sebesar 13,56%. Terdapat lonjakan kenaikan penerimaan PBB-P2 dari target sebesar Rp267.000.000.000 dan terealisasi sebesar Rp289.171.697.663.

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2022 Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu:

1. menerbitkan e-SPPT PBB-P2 dengan menampilkan informasi tunggakan PBB;
2. menanggihkan ketetapan atas objek yang terdapat piutang di atas 5 tahun untuk ketetapan di bawah 2.000.000 dan 10 tahun untuk ketetapan di atas 2.000.000;
3. mendorong berdirinya BUMDes untuk mendekatkan pelayanan kepada Wajib Pajak;
4. pemutakhiran data PBB-P2 secara aktif melalui mekanisme PTSL pendaftaran tanah sistematis lengkap;
5. melaksanakan penagihan aktif atas tunggakan dengan menyampaikan himbauan, surat tagihan, dan bekerja sama dengan pihak lain
6. meningkatkan sistem pelayanan pajak daerah secara daring sehingga akses oleh wajib pajak lebih mudah;
7. perubahan SOTK dalam hal fungsi verifikasi dan validasi dipisahkan mengurangi konflik kepentingan;
8. penguatan Standar Operasional Prosedur;
9. penguatan regulasi pajak daerah;
10. Melakukan pembaruan nilai pasar tanah dan bangunan secara rutin;
11. Penambahan SDM bidang perpajakan;

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2022 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut dapat diatasi namun menyebabkan realisasi kinerja terealisasi secara tidak optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran pertama adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban dalam pembayaran pajak daerah;
2. NJOP yang belum sama dengan nilai pasar menyebabkan sulitnya menentukan NPOP secara wajar atas transaksi jual beli yang terjadi;
3. Terdapat piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) atas objek Tanah Kas Desa (TKD) dan eks TKD yang telah dilakukan inventarisir *by system* dengan potensi piutang sebesar Rp20.000.000.000,00;
4. Tidak adanya kegiatan pemutakhiran massal Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sehingga basis data PBB-P2 tidak dapat dimutakhirkan.

Realisasi kinerja tahun 2022 dan tahun 2021 tidak dapat dibandingkan karena sasaran strategis pada tahun 2022 telah disesuaikan dengan Rencana Strategis 2021-2026. Indikator kinerja sasaran pada renstra tahun 2016-2021 adalah indikator tujuan pada renstra Badan Pelayanan Pajak Daerah pada tahun 2021-2026. Sehingga pada tabel berikut ini disajikan capaian kinerja sasaran tahun 2021:

Tabel 3.3
Kinerja sasaran Tahun 2021

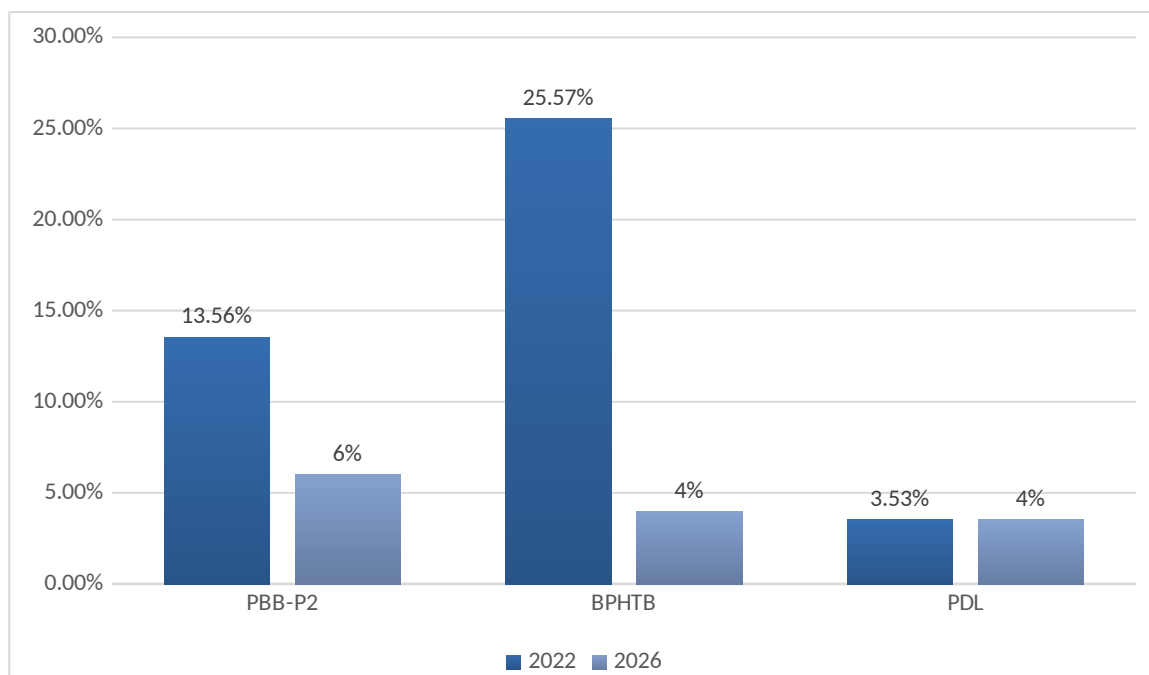
No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian (%)
1	Meningkatnya penerimaan Pajak Daerah dengan kualitas pelayanan prima	SKM terhadap layanan pajak daerah	81,5	94,42	115,85%
		Prosentase keluhan WP yang diselesaikan sesuai waktu tanggap	-	-	-
		Prosentase peningkatan penerimaan pajak daerah	7,14%	10,61%	148,59%
		Prosentase realisasi piutang	-	-	-

Selain itu, jika dibandingkan dengan target jangka menengah maka capaian sasaran pada tahun 2022 ini telah mengalami perkembangan yang baik terhadap target jangka menengah atau akhir dari periode Renstra pada Tahun 2026. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2022 terhadap target target akhir Renstra.

Tabel 3.4
Perkembangan kinerja sasaran pertama Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dengan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah yang Prima terhadap target akhir Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir Renstra	Realisasi Tahun 2022	Persentase Kemajuan
1	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dengan kualitas pelayanan prima	Persentase peningkatan Penerimaan PBB-P2	6,00%	13,56%	226,00%
		Persentase peningkatan Penerimaan BPHTB	4,00%	25,57%	639,25%
		Persentase peningkatan Penerimaan Pajak Daerah lain	3,53%	14,98%	424,36%

Grafik 3.2.4



Capaian kinerja diatas juga harus tetap memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah dengan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah yang Prima adalah sebesar Rp7.654.408.780 dengan realisasi sebesar Rp7.170.181.844. Output dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dapat mengungkit realisasi sasaran Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah dengan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah yang Prima. Berikut rincian realisasi kinerja program/kegiatan dan anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran

Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dengan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah yang Prima.

Tabel 3.5
Realisasi kinerja program dan kegiatan

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja		Anggaran		
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	
A	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dengan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah yang Prima	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase capaian penerimaan PBB-P2 terhadap target	100%	108,30%	7.654.408.780	7.170.181.844	
			Prosentase capaian penerimaan BPHTB terhadap target	100%	132,70%			
			Prosentase capaian penerimaan PDL (pajak restoran, hotel, hiburan, parkir, reklame, Penerangan Jalan dan Air Tanah) terhadap target	100%	103,53%			
		1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah WP/OP PDL yang terverifikasi	11000	15675	7.654.408.780	7.170.181.844
				Jumlah WP/OP PBB P2 yang terverifikasi	8000	9418		
				Jumlah WP/OP BPHTB yang terlayani	56500	63392		
		a	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah OP/WP PBB yang diperbaharui	5000	8427	109.950.000	107.337.500
				Jumlah OP/WP PBB yang didata	10000	12510		
				Jumlah OP/WP PDL yang diperbaharui	11000	1100		
				Jumlah OP/WP PDL yang didata	1000	15675		
b	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Kebijakan BPHTB yang ditetapkan	1	1	136.196.880	129.825.459		
		Jumlah Kebijakan PBB P2 yang ditetapkan	1	1				
		Jumlah Kebijakan PDL yang di tetapkan	1	1				
c	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Sosialisasi BPHTB yang dilaksanakan	3	3	1.170.035.000	1.109.059.960		
		Jumlah Sosialisasi PBB P2 yang dilaksanakan	5	6				
		Jumlah sosialisasi PDL yang dilaksanakan	4	4				
d	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia	2	2	14.128.000	14.010.000		
e	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah pemeliharaan data base pajak daerah	12	12	445.000.000	431.609.394		

f	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah evaluasi nilai pasar BPHTB yang dilaksanakan	1	1	519.120.000	513.768.500
		Jumlah WP/OP PBB P2 yang dilakukan penilaian	20	22		
g	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah surat ketetapan (office assesment) PDL yang diterbitkan	22000	35295	180.850.000	177.750.000
		Jumlah surat ketetapan PBB P2 yang diterbitkan	810000	788686		
h	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah pengajuan pelayanan BPHTB yang dilayani	56500	63392	335.536.800	321.984.137
		Jumlah pengajuan pelayanan PBB P2 yang dilayani	8000	9418		
		Jumlah pengajuan pelayanan PDL yang dilayani	11000	15675		
i	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah WP PBB P2 yang membayar surat tagihan	1000	1530	2.940.648.000	2.689.413.086
		Jumlah WP PDL yang membayar surat tagihan	1000	1406		
j	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah permohonan keberatan PBB yang diselesaikan	500	744	7.034.000	6.894.000
k	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah WP PBB P2 yang dilakukan Penindakan	100	137	1.679.974.400	1.567.550.708
		Jumlah WP PDL yang dilakukan pemeriksaan dan penindakan	12	12		
		Jumlah WP/OP yang dilakukan validasi BPHTB	19500	21984		
		Jumlah WP/OP yang dilakukan verifikasi BPHTB	24000	26345		
l	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah kegiatan Koordinasi Retribusi yang dilakukan	12	12	115.935.700	100.979.100
Total					7.654.408.780	7.170.181.844

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya maka perlu adanya alternatif solusi untuk mewujudkan kinerja sasaran Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dengan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah yang Prima. Berikut alternatif solusi dan rekomendasi berdasarkan analisis capaian kinerja.

1. Penerbitan e-SPPT PBB-P2 dengan menampilkan informasi tunggakan PBB;
2. Penangguhan SPPT PBB-P2 dengan tunggakan diatas 10 tahun dengan ketetapan dibawah 2.000.000
3. Mendorong berdirinya BUMDes untuk mendekatkan pelayanan kepada Wajib Pajak
4. Bekerja sama dengan APH dalam rangka penindakan kepada wajib pajak

5. Pemasangan alat perekam transaksi untuk memudahkan pengawasan transaksi objek pajak
6. Peningkatan kegiatan sosialisasi dan pemberian penghargaan dan insentif perpajakan pada WP dan pihak-pihak yang membantu memungut pajak di tingkat desa atau RT;
7. Pemetaan zona nilai tanah;
8. Perbaikan sistem pelayanan;
9. Upaya penanganan piutang pajak daerah;
10. Melakukan pendataan, penyusunan profil dan pemeriksaan wajib/obyek pajak

2. Sasaran kedua Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah

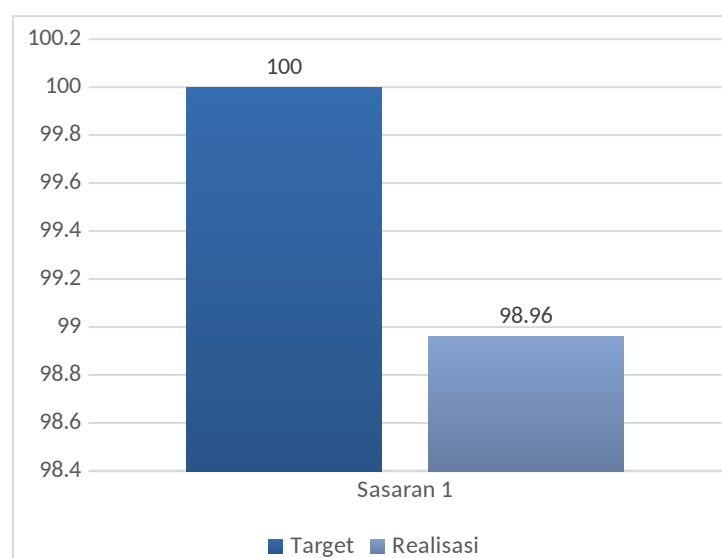
Dalam sasaran kedua untuk tahun 2022 nilai capaian kerjanya sebesar 103,87%. Berikut tabel perbandingan capaian kinerja sasaran kedua.

Tabel 3.2
Realisasi kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	83,25	83,25	100%
		Nilai RB	36,3	34,17	94,13%
		Nilai IPP	4,27	4,27	100%
		Nilai SKM	92,50	94,08	101,71%

Grafik 3.2.1

Realisasi kinerja sasaran pertama Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah Tahun 2022



Dalam pencapaian sasaran kedua diukur tingkat keberhasilannya dengan jumlah indikator sebanyak empat indikator. Indikator pertama Nilai SAKIP adalah Evaluasi atas implementasi SAKIP yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada pemerintah daerah. Indikator kedua adalah Nilai RB, yaitu Penilaian/pemberian predikat atas indeks Reformasi Birokrasi dari Kementerian PAN dan RB. Indikator ketiga adalah Nilai IPP, yaitu evaluasi atas implementasi pelayanan di tingkat kabupaten/kota. Indikator keempat adalah Nilai SKM yaitu data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Indikator terakhir adalah Prosentase Penyerapan Anggaran, yaitu perhitungan berdasarkan prosentase realisasi atas target anggaran Tahun 2022. Berdasarkan tabel 3.2 diatas, indikator pertama Nilai SAKIP dapat direalisasi sebesar 100%, sedangkan indikator kedua yakni nilai RB dapat direalisasi sebesar 94,13%, Indikator ketiga yakni Nilai IPP dapat direalisasi 100%, dengan nilai IPP sebesar 4,27 (kategori A-). Untuk nilai SKM sebagai indikator keempat tercapai 101,71%.

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2022 Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu:

1. Memperbaiki atau menyesuaikan aspek ketatalaksanaan, baik administrasi maupun operasional;
2. Peningkatan sumber daya dalam pengelola pajak daerah;

Realisasi kinerja tahun 2022 pada sasaran Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah juga pada dua indikator mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021, sedangkan pada dua indikator lainnya mengalami penurunan. Peningkatan kinerja ini lebih banyak disebabkan oleh komitmen seluruh pegawai Badan Pelayanan Pajak daerah Kabupaten Sidoarjo, baik kepala badan hingga pelaksana, sedangkan penurunan kinerja atas indikator SKM disebabkan oleh keterlambatan Wajib Pajak dalam memenuhi persyaratan layanan PBB sehingga mempengaruhi waktu penyelesaian layanan, namun nilai SKM pada tahun 2022 masih dalam kategori Sangat Baik. Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2021-2022:

Tabel 3.3
Perkembangan kinerja sasaran pertama Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah Tahun 2021-2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	
			2021	2022
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggar	Nilai SAKIP	82,96	83,25
		Nilai RB	36,06	34,17

aan Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai SKM	94,42	94,08
	Nilai IPP	A- (4,25)	A- (4,27)

Grafik 3.2.3 Perkembangan kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah Tahun 2021-2022

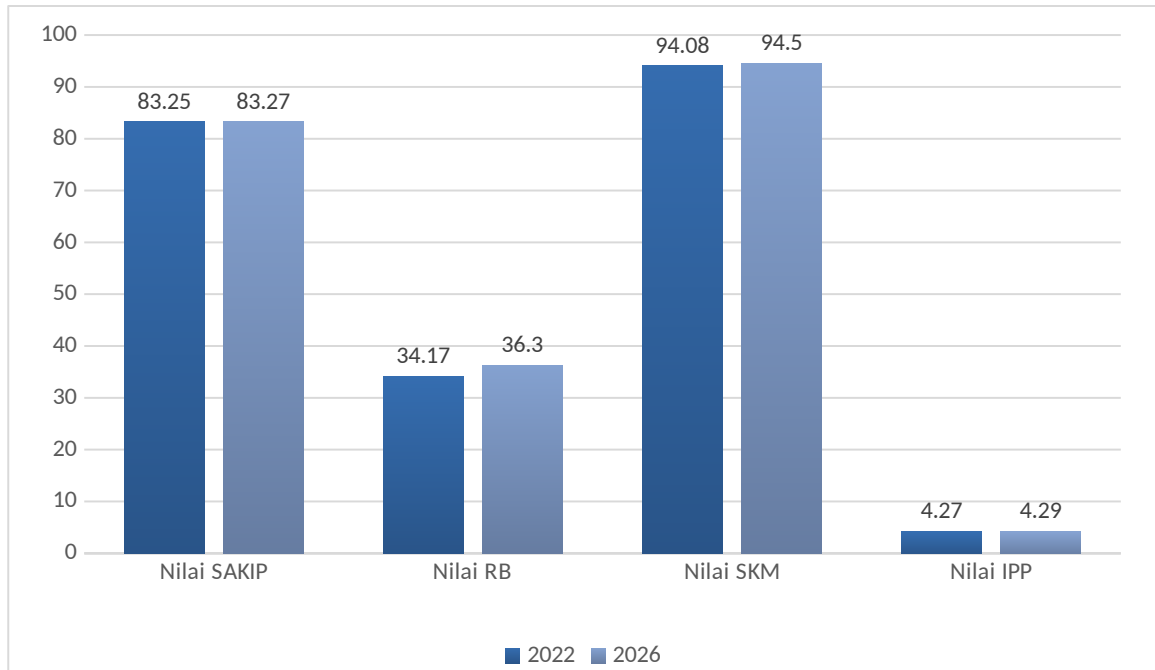


Selain itu jika dibandingkan dengan target jangka menengah maka capaian pada tahun 2022 ini mengalami perkembangan yang baik terhadap target jangka menengah atau akhir dari periode Renstra pada Tahun 2026. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2022 terhadap target target akhir Renstra.

Tabel 3.4
Perkembangan kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah terhadap target akhir Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir Renstra	Realisasi Tahun 2022	Persentase Kemajuan
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	83,27	83,25	99,98%
		Nilai RB	36,3	34,17	94,13%
		Nilai SKM	94,50	94,08	99,56%
		Nilai IPP	A- (4,29)	A- (4,27)	99,53%

Grafik 3.2.4



Capaian kinerja diatas juga harus tetap memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah adalah sebesar Rp40.332.794.598 dengan realisasi sebesar Rp39.720.872.668. Output dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dapat mengungkit realisasi sasaran Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah. Berikut rincian realisasi kinerja program/kegiatan dan anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah.

Tabel 3.5
Realisasi kinerja program dan kegiatan

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	90	90	100%	40.332.794.598	39.720.872.668	98,48%
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan yang disusun	3	3	100%	525.000.000	514.957.860	98,09%
a	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	3	3	100%	525.000.000	514.957.860	98,09%
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah gaji ASN yang dibayarkan	12	12	100%	31.639.264.333	31.275.037.828	98,85%
a	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12	12	100%	31.639.264.333	31.275.037.828	98,85%
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pakaian dinas ASN yang tersedia	100	100	100%	61.066.600	60.082.000	98,39%
a	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas ASN yang tersedia	100	100	100%	61.066.600	60.082.000	98,39%
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	90	90	100%	3.211.992.365	3.136.399.941	97,65%
a	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik/penerangan yang tersedia	23	23	100%	49.981.640	48.467.040	96,97%

b	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	21	21	100%	2.450.537.426	2.390.655.032	97,56%
		Jumlah jenis peralatan dan bahan kebersihan yang tersedia	20	20	100%			
c	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah BBM yang disediakan	30000	30000	100%	300.000.000	299.949.991	99,98%
d	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis cetak dan penggandaan yang tersedia	30	30	100%	66.466.100	64.778.075	97,46%
e	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jamuan rapat/tamu yang disediakan	700	700	100%	35.125.000	29.965.000	85,31%
f	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	10	13	130%	309.882.199	302.584.803	97,65%
		Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti	100	100	100%			
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	90	90	100%	599.329.800	596.944.250	99,60%
a	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan kelengkapan gedung/kantor	2	3	150%	599.329.800	596.944.250	99,60%
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase teenuhi jasa penunjang perkantoran perangkat daerah	90	90	100%	3.364.141.500	3.220.251.739	95,72%
a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan surat keluar masuk yang dikelola	12	12	100%	55.217.800	55.114.452	99,81%
b	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	12	12	100%	858.500.000	825.855.616	96,20%
c	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah honorarium pengelola keuangan dan barang yang terbayar	12	12	100%	2.450.423.700	2.339.281.671	95,46%
		Jumlah tenaga keamanan kantor yang terbayar	84	84	100%			
		Jumlah Tenaga Kebersihan yang terbayar	60	60	100%			
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	80	80	100%	932.000.000	917.199.050	98,41%
a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	5	6	120%	58.000.000	54.388.280	93,77%
		Jumlah kendaraan jabatan yang dipelihara	5	5	100%			
b	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	10	10	100%	148.000.000	142.465.555	96,26%
		Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional yang lunas pajaknya	10	10	100%			
c	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jaringan komputer yang teelihara	50	50	100%	211.000.000	209.237.650	99,16%
		Jumlah jenis peralatan yang dipelihara	6	6	100%			
		Jumlah mesin yang dipelihara	4	4	100%			
d	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan gedung/kantor yang dipelihara	5	5	100%	515.000.000	511.107.565	99,24%
TOTAL						40.332.794.598	39.720.872.668	

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya maka perlu adanya alternatif solusi untuk mewujudkan kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas

Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah. Berikut alternatif solusi dan rekomendasi berdasarkan analisis capaian kinerja.

1. Pengembangan kompetensi SDM pengelola pajak daerah;
2. Pemanfaatan teknologi informasi bagi pegawai

C Realisasi Anggaran

Laporan pelaksanaan anggaran Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk tahun anggaran 2022 berdasarkan realisasi kinerja dan keuangan yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran

No.	Program/Kegiatan	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	40.332.794.598	39.720.872.668	98,48%
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	525.000.000	514.957.860	98,09%
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	31.639.264.333	31.275.037.828	98,85%
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	61.066.600	60.082.000	98,39%
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.211.992.365	3.136.399.941	97,65%
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	599.329.800	596.944.250	99,60%
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.364.141.500	3.220.251.739	95,72%
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	932.000.000	917.199.050	98,41%
B	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	7.654.408.780	7.170.181.844	93,67%
1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	7.654.408.780	7.170.181.844	93,67%

D Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.7 Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Penerimaan Pajak daerah Dengan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah yang	Persentase Peningkatan Penerimaan PBB-P2	4,85%	13,56%	279,51%	Rp3.802.338.800	Rp3.532.059.723	92,89%
		Persentase Peningkatan Penerimaan	14,86%	25,57%	172,05%	Rp1.925.948.700	Rp1.833.408.454	95,20%

	Prima	BPHTB						
		Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak daerah Lain	11,05%	14,98%	135,55%	Rp. 1.926.121.280	Rp. 1.804.713.667	93,70%
		Penerimaan pajak daerah	Rp1.068.000.000.000	Rp1.215.303.165.454,49	113,79%	Rp. 7.654.408.780	Rp. 7.170.181.844	93,67%
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	83,25	83,25	100,00%	40.332.794.598	39.720.872.668	98,48%
		Nilai RB	36,3	34,17	94,13%			
		Nilai SKM	92,50	94,08	105,71%			
		Nilai IPP	A (4,27)	A- (4,27)	100%			

Tabel 3.8 Efektivitas dan Efisiensi Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Penerimaan Pajak daerah Dengan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah yang Prima	Persentase Peningkatan Penerimaan PBB-P2	279,51%	92,89%	186,62%
	Persentase Peningkatan Penerimaan BPHTB	172,05%	95,20%	76,85%
	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak daerah Lain	135,55%	93,70%	41,85%
	Penerimaan pajak daerah	113,79%	93,67%	20,12%
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	98,96%	98,48%	0,48%
	Nilai RB			
	Nilai SKM			
	Nilai IPP			

Catatan: % Tingkat Efisiensi = % Capaian Kinerja - % Penyerapan Anggaran

BAB IV

Penutup

A *Kesimpulan*

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk tahun 2022 kategori berhasil. Namun begitu masih diperlukan upaya perbaikan/penyempurnaan, sehingga pencapaian sasaran pada tahun berikutnya dapat optimal.

Untuk sasaran yang dikategorikan belum berhasil, kendala yang dihadapi antara lain:

- Data WP/OP masih ada yang belum valid yang berpengaruh terhadap ketetapan pajak tidak sesuai kondisi sebenarnya;
- Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban dalam pembayaran pajak daerah;
- NJOP yang belum sama dengan nilai pasar menyebabkan sulitnya menentukan NPOP secara wajar atas transaksi jual beli yang terjadi;
- Terdapat piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) atas objek Tanah Kas Desa (TKD) dan eks TKD yang telah dilakukan inventarisir *by system* dengan potensi piutang sebesar Rp20.000.000.000,00;
- Tidak adanya kegiatan pemutakhiran massal Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sehingga basis data PBB-P2 tidak dapat dimutakhirkan.

B *Tindak Lanjut*

Untuk mengatasi kendala yang telah diuraikan diatas, Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo telah melakukan tindak lanjut, antara lain:

1. Pengembangan pelayanan pembayaran dan pelaporan pajak elektronik;
2. Menyelenggarakan kegiatan penghapusan sanksi administratif pajak daerah;
3. Koordinasi untuk penghapusan dengan penghapusan secara bertahap;
4. Mengusulkan SDM untuk mengikuti kediklatan perpajakan;
5. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat/Wajib Pajak melalui media cetak maupun elektronik;
6. Penguatan regulasi pajak daerah;
7. Melakukan pembaruan nilai pasar tanah dan bangunan secara rutin;
8. Melaksanakan penagihan aktif atas tunggakan dengan menyampaikan himbauan, surat tagihan, dan bekerja sama dengan pihak lain.

Lampiran-Lampiran

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH KABUPATEN SIDOARJO**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ARI SURYONO, S.Sos., M.Si**
Jabatan : Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AHMAD MUHDOR, S.IP.**
Jabatan : Bupati Sidoarjo
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sidoarjo, 3 Februari 2022

Pihak Pertama,
**KEPALA BADAN
PELAYANAN PAJAK DAERAH**

Pihak Kedua,
BUPATI SIDOARJO

AHMAD MUHDOR, S.IP.

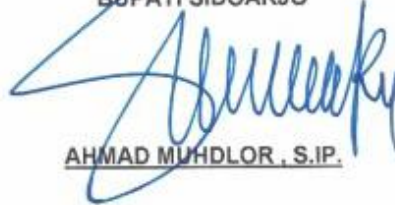
ARI SURYONO, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750213 199311 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dengan kualitas Pelayanan Pajak Daerah yang Prima	Persentase Peningkatan Penerimaan PBB-P2	7,21 %
	Persentase Peningkatan Penerimaan BPHTP	14,51 %
	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Lain	11,24 %
	Penerimaan Pajak Daerah	Rp.1.034.000.000.000
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	1. Nilai SAKIP	A
	2. Nilai RB	36,3
	3. Nilai IPP	A
	4. Nilai SKM	Sangat Baik
	5. Persentase Penyerapan Anggaran	90 %

Program	Anggaran
(4)	(5)
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 35.364.861.451
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 7.228.591.180
JUMLAH	Rp. 42.593.452.631

Pihak Kedua,
BUPATI SIDOARJO



AHMAD MUHDLOR, S.IP.

Sidoarjo, 3 Februari 2022
Pihak Pertama,
**KEPALA BADAN
PELAYANAN PAJAK DAERAH**



ARI SURYONO, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750213 199311 1 001

B. Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama Badan Pelayanan Pajak Daerah Tahun 2022

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN
BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO**

Tugas Jabatan : Memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Badan Pelayanan Pajak Daerah.

Fungsi Jabatan : 1. Perencanaan program pelayanan pajak daerah serta kesekretariatan;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas badan;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas badan;
4. Pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
5. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya

Tujuan : Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah

Indikator Tujuan : Peningkatan pajak daerah

No	Sasaran	Indikator	Target Capaian Kinerja 2022
I	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dengan kualitas pelayanan pajak daerah yang prima	Persentase Peningkatan Penerimaan PBB-P2	7,21%
		Persentase Peningkatan Penerimaan BPHTB	14,51%
		Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak daerah Lain	11,24%
		Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Terhadap Pelayanan Pajak Daerah	87


**KEPALA BADAN PELAYANAN
PAJAK DAERAH**
ARI SURYONO, S.Sos., M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19750213 199311 1 001

C. Rencana Aksi Perangkat Daerah Tahun 2022

Rencana Aksi Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Tahun 2022, diambil dari website e-Kinerja.



RENCANA AKSI

BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH		PERIODE PENILAIAN : 2022	
PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
Nama	ARI SURYONO., S.Sos, M.Si	Nama	H. AHMAD MUHDOR, S.IP
NIP	197502131993111001	NIP	0
Pangkat / Gol.Ruang	IV/c / Pembina Utama Muda	Pangkat / Gol.Ruang	- / -
Jabatan	KEPALA BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH	Jabatan	BUPATI SIDOARJO
Unit Kerja	BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH	Unit Kerja	PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

HASIL KERJA		
1	Tercapainya realisasi penerimaan pajak daerah atas target dengan kualitas pelayanan yang prima	Rencana Aksi :
2	Meningkatnya penerimaan PBB P2 dengan kualitas pelayanan yang prima	Rencana Aksi :
3	Meningkatnya penerimaan pajak daerah lainnya dengan kualitas pelayanan yang prima	Rencana Aksi :
4	Meningkatnya penerimaan pajak BPHTB dengan kualitas pelayanan yang prima	Rencana Aksi :
5	Meningkatnya kualitas tata kelola OPD yang baik	Rencana Aksi :
6	Meningkatnya kualitas tata kelola OPD yang baik	Rencana Aksi :
7	Meningkatnya kualitas tata kelola OPD yang baik	Rencana Aksi :
8	Meningkatnya kualitas tata kelola OPD yang baik	Rencana Aksi :
9	Meningkatnya kualitas tata kelola OPD yang baik	Rencana Aksi :

Sidoarjo, 2 Januari 2022

BUPATI SIDOARJO



Ditandatangani secara elektronik oleh:

H. AHMAD MUHDOR, S.IP

0

H. AHMAD MUHDOR, S.IP

0

KEPALA BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH



Ditandatangani secara elektronik oleh:

ARI SURYONO., S.Sos, M.Si

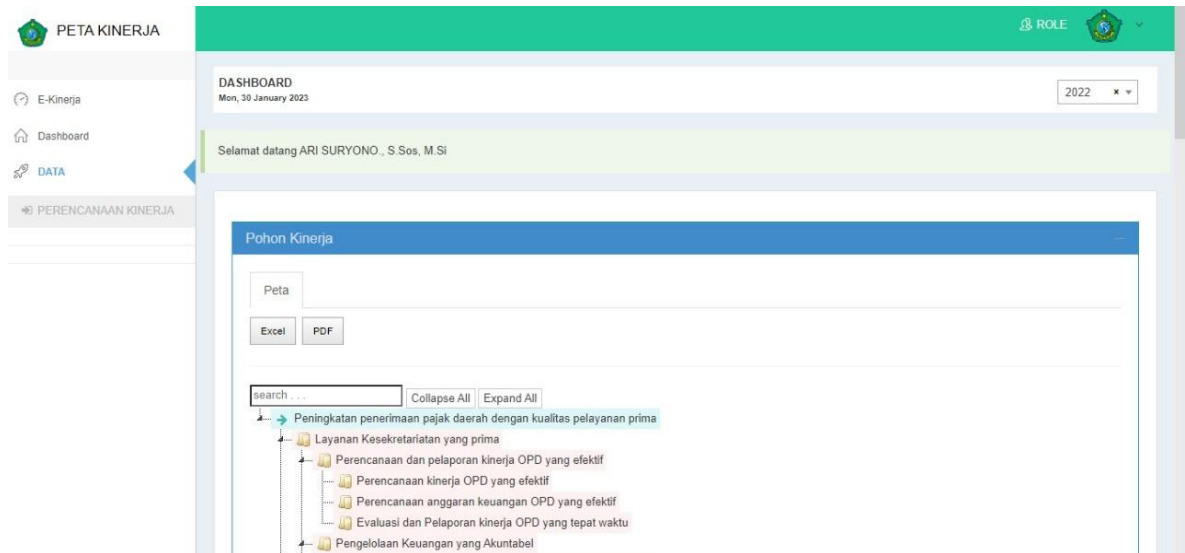
197502131993111001

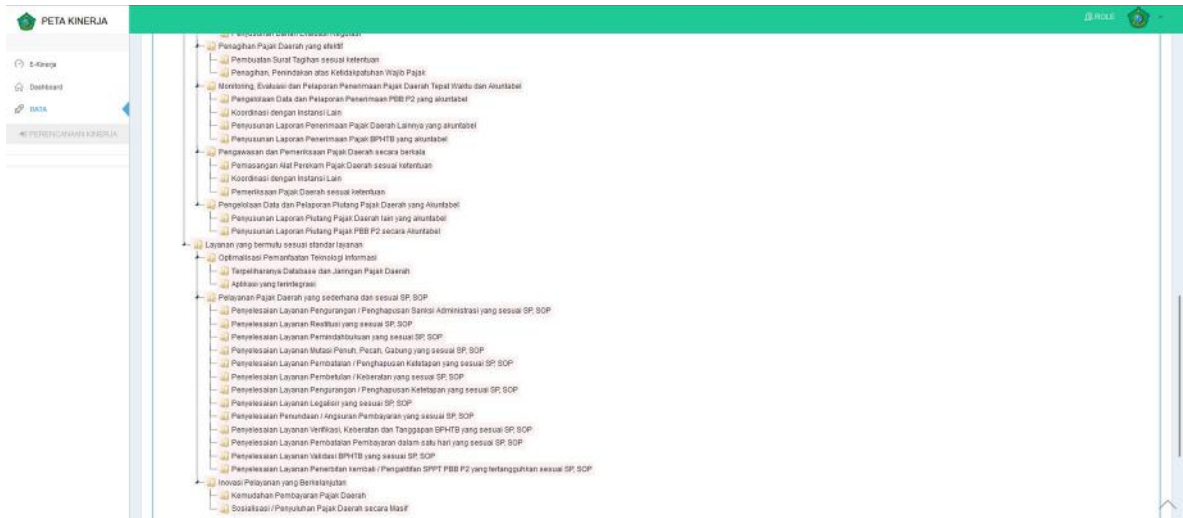
ARI SURYONO., S.Sos, M.Si

197502131993111001

D. Pohon Kinerja yang menunjang sasaran kinerja 2022

Pohon Kinerja Tahun 2022 ini diambil dari website e-Kinerja <http://skp2021.sidoarjojab.go.id/skp-2022/web/index.php/>





E. Capaian Prestasi/Penghargaan Perangkat Daerah Tahun 2022

a. Peringkat I Penghargaan atas Penilaian Kinerja Tahun 2022



- b. Peringkat I tingkat Badan & Dinas Penghargaan atas Indeks Pelayanan Publik Tahun 2022



- c. Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

